



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

LAPORAN AKHIR

KOORDINASI PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA (INDONESIA DISASTER FUND - IDF)

DIREKTORAT KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL
2015

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir Koordinasi Pendanaan Penanggulangan Bencana (Indonesia Disaster Fund-IDF) disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 04/M.PPN/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kantor Kementerian PPN/Bappenas.

Pelaksanaan Koordinasi Pendanaan Penanggulangan Bencana (Indonesia Disaster Fund-IDF) ini dimaksudkan untuk terciptanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan mitra pembangunan dalam menghadapi bencana, terlaksananya penetapan prioritas, dan adanya evaluasi. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam penerapan proses perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program, akan dilihat, serta permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi untuk kemudian diupayakan pemberian saran sebagai perbaikan proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang.

Laporan Koordinasi Pendanaan Penanggulangan Bencana (Indonesia Disaster Fund-IDF) tahun 2015 ini masih terdapat kekurangan sehingga belum sempurna, oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritiknya sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaan pemantauan perencanaan dan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan pada tahun berikutnya.

Jakarta, Desember 2015

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas

Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Manfaat.....	4
BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN	6
2.1. Ruang Lingkup Kegiatan.....	6
2.2. Pelaksanaan Kegiatan.....	6
2.3. Keluaran Yang Diharapkan	7
BAB III HASIL PELAKSANAAN KOORDINASI PENDANAAN PENANGGULANGAN	
BENCANA (INDONESIA DISASTER FUND/IDF)	8
3.1. Koordinasi dan Penguatan Sekretariat IDF.....	8
3.2. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan IDF.....	10
3.3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan IDF.....	11
3.4. Pelaksanaan Program Dukungan Pemulihan di Sinabung	12
3.5. Pelaksanaan Program Dukungan Pemulihan di Kelud.....	23
3.6. Pemanfaatan Dana IDF World Bank Window	33
BAB KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	38
4.1. Kesimpulan.....	38
4.2. Rekomendasi	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Struktur Kelembagaan IMDFF-DR/IDF	4
Gambar 3. 1: Workshop UNDP dan BPBD Karo dalam Pelaksanaan Renaksi RR dan Liputan media.....	16
Gambar 3. 2: Pertemuan dengan UNJP dan Komunitas di Kantor Sekber di BPBD Karo serta Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sumut dan BPBD Kabupaten Karo	18
Gambar 3. 3: ToT Pengelolaan Keuangan dan ToT Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan oleh ILO	20
Gambar 3. 4: Pelatihan Manajemen Keuangan Keluarga dan Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan.....	21
Gambar 3. 5: Kerusakan infrastruktur desa (jembatan dan bendungan) akibat material vulkanik dan lahar dingin di Sungai Konto di desa Pandansari, Ngantang Kecamatan, Kabupaten Malang.....	24
Gambar 3. 6: Pertemuan pada perumusan usulan skema RR biasa didanai oleh BNPB yang diikuti oleh kabupaten Kediri, Blitar & Malang BPBD	25
Gambar 3. 7: Lokakarya dan konsultasi untuk mendukung BNPB, Provinsi Jawa Timur, dan BPBD di tiga kabupaten yang terkena dampak untuk menyesuaikan Rencana pelaksanaan program RENAksi	26
Gambar 3. 8: Project Board Meeting UNJP Kelud 7-9 Juli 2015 di Kabupaten Kediri	27
Gambar 3. 9: Rapat Koordinasi Pemulihan Bidang Pertanian di Surabaya	28
Gambar 3. 10: Lokasi kandang komunal di Besowo Desa dan bantuan ternak kambing yang akan diberikan.....	29
Gambar 3. 11: Pelatihan Fasilitator VIS di kabupaten Kediri dan Pelatihan VIS input data di desa Modangan, Nglepok Kecamatan, Kabupaten Blitar	30
Gambar 3. 12: Pertemuan pada Sistem Informasi Bencana Kabupaten (DDIS) formulasi grand design di Kabupaten Kediri	31
Gambar 3. 13: Pelatihan pengumpulan data untuk tim survei di Malang dan Blitar	32
Gambar 3. 14: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kontingensi	33
Gambar 3. 15: Infrastruktur lingkungan permukiman	36
Gambar 3. 16: Showroom Rumah Produksi	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR) merupakan fasilitas pendanaan yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan mitra pembangunan. Tujuan pembentukan fasilitas ini adalah untuk mendukung penguatan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya dalam pemulihan pasca bencana. Pembentukan IMDFF-DR merupakan embrio dari pengalaman Indonesia dalam pendanaan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 dan pasca bencana gempa bumi di yang melanda di Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006. Melalui fasilitas pendanaan *Multi Donor Fund Aceh-Nias (MDF-AN)* memberikan kontribusi yang besar dalam pemulihan Aceh-Nias dan *Java Reconstruction Fund (JRF)* juga turut membantu pemerintah Indonesia dalam memulihkan pasca bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah serta pasca bencana tsunami di Pangandaran, Jawa Barat, tahun 2006-2011.

Berawal dari kejadian bencana gempa bumi yang melanda Provinsi Sumatera Barat pada 30 September 2009, menjadi gagasan awal pembentukan fasilitas pendanaan IMDFF-DR sebagai upaya untuk menghimpun dukungan internasional untuk pemulihan adalah bencana gempa bumi di Sumatera Barat pada 30 September 2009. Namun IMDFF-DR tidak hanya fokus pada pemulihan di Sumatera Barat, namun secara nasional sesuai dengan status bencana dan kebutuhan pemerintah terhadap bantuan internasional.

IMDFF-DR secara resmi dibentuk pada November 2009, dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia bersama United Nations dan World Bank. IMDFF-DR beroperasi dengan menggunakan sistem dua window yang masing-masing akan dikelola oleh Bank Dunia sebagai wali amanah (*trustee*) dan UNDP mewakili PBB sebagai *administratif agent*. Pemanfaatan dua windows dimaksudkan untuk mengoptimalkan keahlian dan pengalaman serta jejaring yang dimiliki oleh PBB dan Bank Dunia. Selain itu, dua window ini digunakan untuk mengakomodasikan sistem pengadministrasian dana yang berbeda-beda agar dapat dilakukan secara sinergis dan saling memperkuat.

IMDFF-DR merupakan fasilitas pendanaan yang bertujuan untuk memobilisasi dana dan mengkoordinasikan bantuan internasional dalam rangka mendukung dan melengkapi upaya Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. IMDFF-DR berperan dalam mengisi gap (*gap*

filler) dan menjadi katalisator sehingga kualitas penanggulangan bencana dapat terus meningkat dengan memanfaatkan jejaring dan keahlian dan pengalaman mitra internasional

Pada akhir tahun 2010 IMDFF-DR secara resmi diaktifkan sebagai respon untuk pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai pada Oktober 2010 dan erupsi Gunung Merapi November 2010. Sejak IMDFF-DR resmi diaktifkan, pemerintah New Zealand merupakan negara kontributor pertama yang memberikan bantuan untuk proses pemulihan di Mentawai dan Merapi sebesar NZD 6,5 juta yang diberikan secara bertahap, yakni NZD 4 juta pada bulan Juli 2011 dan NZD 2,5 juta Juli 2012 dan telah disalurkan melalui World Bank Window sebesar NZD 2,5 juta dan Window UN sebesar NZD 4 juta dan pemanfaatannya telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Programme Document Mentawai Islands Livelihood Recovery* dan *Merapi Volcano Eruption Livelihood Recovery* pada tanggal 31 Januari 2012. Sesuai *programme document (prodoc)* yang telah di tandangani oleh Ketua Steering Committee, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB selaku National Lead Agency dan UN Resident Coordinator, pelaksanaan kegiatan UNJP Mentawai dan Merapi dilaksanakan pada Februari 2012 s.d Februari 2013. Dukungan IMDFF-DR untuk pemulihan Mentawai didukung oleh FAO, UNDP, dan ILO. Sedangkan pemulihan wilayah Merapi didukung oleh UNDP, IOM dan FAO. Seiring dengan dinamika pelaksanaan dilapangan, pelaksanaan UNJP Mentawai dan UNJP Merapi telah mengalami beberapa kali perpanjangan baik *no-cost extension* maupun dengan perpanjangan dengan tambahan pendanaan (*top-up funding*). Hal ini dilakukan untuk mencapai target yang direncanakan dan memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan dilapangan dan tentunya yang disesuaikan dengan ketersediaan alokasi dana serta penyelesaian laporan akhir UNJP Mentawai dan UNJP Merapi baik dari sisi substansi maupun adminitrasi termasuk penyelesaian pelaporan asset. Dengan berakhirnya dukungan IDF untuk pemulihan pasca bencana di Mentawai dan Merapi pada 31 Desember 2014, IDF sebagai fasilitas pendanaan diharapkan dapat terus meningkatkan perannya sebagai katalis dan *gap filler* dalam memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Seiring dengan banyaknya kejadian bencana yang melanda berbagai wilayah di Indonesia pada tahun 2014, diantaranya bencana banjir bandang di Kota Manado dan sekitarnya, erupsi Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur serta erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan adanya kebutuhan segera untuk dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak di wilayah terdampak tersebut, Pemerintah New Zealand melalui IDF memberikan tambahan kontribusi pendanaan sebesar NZD 4,1 juta (USD 3,5 juta) untuk mendukung upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut yang telah disetujui oleh Tim Pengarah IDF pada pertemuan Tim Pengarah tanggal 13 Mei 2014. Hingga tahun 2015, total kontribusi Pemerintah New Zealand melalui IDF telah mencapai NZD 10,6 juta (eq. USD 8,5 juta) yang disalurkan melalui window

United Nations sebesar NZD 6 juta (USD 4,8 juta) dan window Bank Dunia sebesar NZD 4,6 juta (USD 3,7 juta).

Pada tahun 2014, kegiatan IMDFF-DR/IDF difokuskan untuk mendukung pemulihan pasca bencana Mentawai dan Merapi serta penyelesaian laporan akhir substansi dan administrasi. Kemudian, persiapan pelaksanaan dukungan pemulihan di daerah pasca bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Blitar, Malang dan Kediri serta pemulihan banjir bandang di Kota Manado dan sekitarnya.

Pada awal tahun 2015, pelaksanaan IDF untuk mendukung pemulihan di wilayah pasca bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar di Provinsi Jawa Timur telah dimulai dengan ditandatanganinya *Programme Document (Prodoc) Mt. Sinabung Recovery Support Programme (SIRESUP)* dan *Support to Mt. Kelud Post-Eruption Recovery* pada November 2014. Sehingga dukungan IDF untuk pemulihan di wilayah pasca bencana tersebut telah mulai efektif berjalan pada awal 2015. Selain itu, dukungan IDF untuk dalam penguatan penanggulangan bencana di Indonesia, telah mulai berjalan dengan ditandatanganinya dukungan untuk non-pemulihan (*non-recovery intervention*) *Programme Document Enhancing the National Recovery Framework: Strengthening the Recovery Governance*, yang telah efektif pada tanggal 1 May 2015 sampai dengan 30 April 2016.

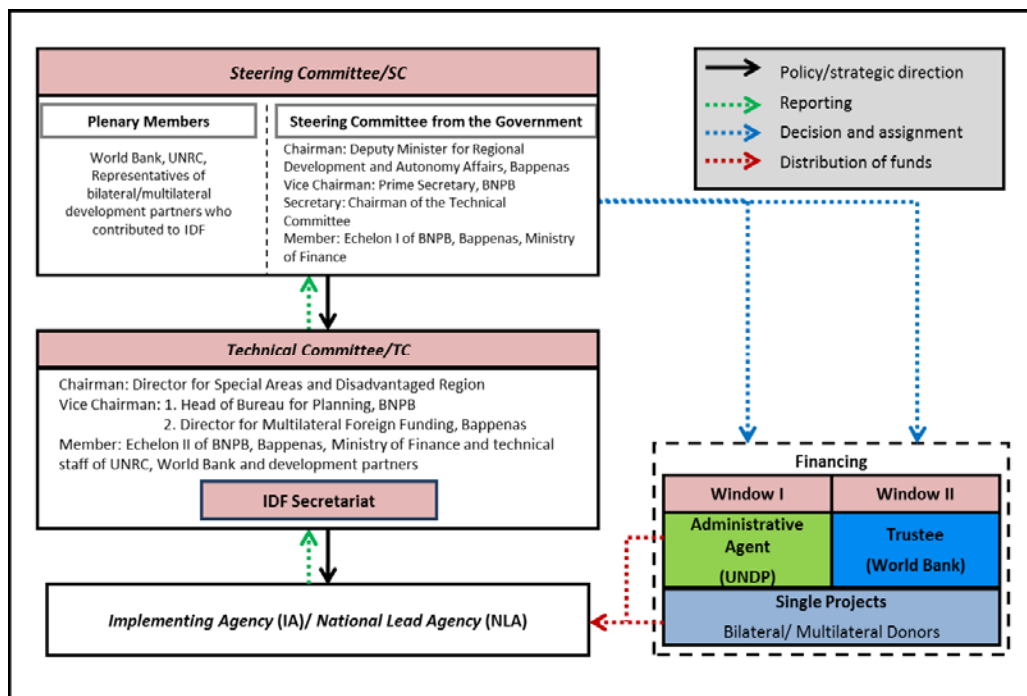
Secara umum pelaksanaan IDF pada tahun 2015 lebih difokuskan pada koordinasi dengan mitra pembangunan, lembaga pelaksana, kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan persiapan pelaksanaan pemulihan di wilayah pasca bencana Manado, Sinabung dan Kelud, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dukungan IDF melalui window United Nations dan window Bank Dunia. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan IDF sesuai arahan Tim Pengarah, selain perluasan ruang lingkup dan transformasi nama IMDFF-DR menjadi IDF, penyesuaian juga diperlukan pada landasan pembentukan IMDFF-DR/IDF, yaitu Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia, United Nations dan World Bank. Perubahan MoU dimaka perlu dilakukan untuk juga penyesuaian terhadap Pedoman Pelaksanaan (SOP) IMDFF-DR dan penyusunan Strategy IMDFF-DR/IDF dengan menyesuaikan serangkaian pembelajaran yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim Teknis dan Tim Pengarah.

Hasil evaluasi terhadap portofolio IMDFF-DR dan keputusan pertemuan Steering Committee IMDFF-DR, telah disetujui perubahan/penyesuaian struktur kelembagaan IMDFF-DR. Struktur organisasi IMDFF-DR terdiri dari Tim Pengarah (*Steering Committee*), Tim Teknis (*Technical Committee*), dan *Sekretariat*. Tim Pengarah merupakan organ tertinggi dalam IMDFF-DR, yang

terdiri dari perwakilan Pemerintah Indonesia dan *Plenary Members* (*Administrative Agent*, *Trustee* dan perwakilan lembaga donor). Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Teknis dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi IMDFF-DR yang dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Menteri PPN/Bappenas.

Sesuai hasil pertemuan Steering Committee IDF pada tanggal 12 Desember 2013, secara prinsip Steering Committee telah menyetujui usulan perubahan SOP IMDFF-DR, yang diikuti dengan perubahan ruang lingkup yang semula lebih terfokus pada dukungan penguatan pelaksanaan pemulihan (pasca bencana) menjadi dukungan penguatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh (disaster management), transformasi IMDFF-DR menjadi IDF. Perubahan ini diikuti dengan penyesuaian Struktur Kelembagaan IMDFF-DR/IDF, Ruang Lingkup sesuai dengan mandat UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan penyederhanaan proses-proses pelaksanaan dalam penyelenggaraan IMDFF-DR termasuk mekanisme pelaksanaan dan pengusulan kegiatan dan monitoring dan evaluasi.

Gambar 1. 1: Struktur Kelembagaan IMDFF-DR/IDF



1.2. Tujuan dan Manfaat

Secara umum pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi IMDFF-DR bertujuan untuk mendukung tersusunnya langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat

yang tertimpa bencana dan juga untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam menghadapi bencana, melalui :

- Melaksanakan koordinasi upaya-upaya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana.
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan skema dukungan pendanaan dari negara/lembaga donor melalui mekanisme yang cepat dimobilisasi, fleksibel, transparan dan akuntabel bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait;
- Melaksanakan koordinasi perencanaan, fasilitasi dan pemantauan skema pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana di lokasi kejadian bencana dan pasca bencana.
- Melaksanakan koordinasi antar kegiatan untuk pemanfaatan dana IMDFF-DR yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan penetapan prioritas dan kebijakan serta arahan strategis bagi pemanfaatan dana IMDFF-DR.
- Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan IMDFF-DR dan pengawasan terhadap porto folio IMDFF-DR.

Sementara itu manfaat/benefit yang didapat dari hasil Koordinasi IMDFF-DR adalah:

- (1) Terpenuhinya bentuk skema pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan bantuan bencana antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan dan donor internasional;
- (3) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya pengelolaan bantuan bencana yang sistematis dan terintegrasi.

Dampak/impacts yang didapat adalah meningkatkan koordinasi dan kemampuan pemangku kepentingan di dalam upaya-upaya mencapai bentuk pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun lingkup kegiatan koordinasi IDF, secara substansi kegiatan dikelompokkan ke dalam penetapan kebijakan, pengawasan dan evaluasi terhadap usulan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh IDF.

Sementara itu dalam pelaksanaan koordinasi strategis dalam rangka perencanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan yang didanai oleh IDF, maka lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan melalui sekretariat adalah :

- a. Membantu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam hal mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan tugas-tugas dan kewenangan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana IDF;
- b. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan strategis pemanfaatan dana IDF;
- c. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam menyusun masukan isu strategis, prioritas dan kebijakan strategis kepada Tim Pengarah;
- d. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam melakukan evaluasi terhadap proyek/kegiatan yang diusulkan kepada IDF sebelum dimintakan persetujuan kepada Tim Pengarah;
- e. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan proyek/kegiatan yang memanfaatkan dana IDF;
- f. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam menyusun Petunjuk Operasional sesuai kebijakan penanggulangan bencana;
- g. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi dengan Trustee, Administrative Agent dan Implementing Agency dalam pelaksanaan IDF;
- h. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam menyusun kerangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek/kegiatan yang memanfaatkan dana IDF;

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Strategis IDF dilaksanakan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Tim Pengarah adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional yang dibantu anggota tim

pengarah yang terdiri Kementerian/lembaga terkait; Ketua Tim Teknis adalah Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal yang dibantu oleh anggota dari Kementerian/Lembaga terkait dan Sekretariat Tim Koordinasi IDF terdiri dari ketua, wakil ketua serta anggota yang berasal dari kementerian/lembaga. Untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas Tim Teknis akan diusulkan sebanyak 11 (sebelas) orang dari Kementerian/Lembaga dan Direktorat terkait di Bappenas sebagai anggota tim pelaksana; dan diperlukan adanya sekretariat sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Ketua Sekretariat Tim Koordinasi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan sekretariat, mengatur dan mengendalikan bidang secara keseluruhan dan melaporkan kepada tim teknis. Ketua Sekretariat Tim Koordinasi juga bertanggungjawab memimpin dan memonitor serta mengarahkan secara substantif pada laporan dan pertemuan-pertemuan yang diadakan serta melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, koordinasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, serta penyusunan laporan hasil koordinasi pelaksanaan sekretariat, baik secara substansi maupun dari segi keuangannya

Sedangkan anggota tim pelaksana dan Sekretariat kegiatan koordinasi strategis IDF, bertanggungjawab atas pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan akhir/final atas pelaksanaannya.

2.3. Keluaran Yang Diharapkan

Keluaran yang diharapkan, yang akan disusun oleh Tim Pelaksana Koordinasi IDF, adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, dan lokakarya/konsinyering skema pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang efektif dan efisien;
2. Terlaksananya penyusunan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh IDF.
3. Tersusunnya laporan pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh IDF.
4. Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis IDF.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN KOORDINASI PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA (INDONESIA DISASTER FUND/IDF)

3.1. Koordinasi dan Penguatan Sekretariat IDF

Sekretariat IDF mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai *supporting system* dalam pengambilan keputusan oleh Tim Teknis dan Tim Pengarah, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, *Trustee*, *Administrative Agent*, mitra pembangunan, lembaga pelaksana dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kapasitas Sekretariat perlu ditingkatkan dengan melengkapi dirinya dengan kemampuan analisis dan data yang memadai. Sekretariat harus mampu dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan *policy analysis*, pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat memberikan masukan dalam hal kebijakan kepada Tim Teknis dan Tim Pengarah. Organ-organ Sekretariat harus lengkap sesuai dengan kebutuhan, dengan mekanisme kerja yang dapat menjamin pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan lebih sistematis.

Penguatan IDF sebagai *catalytic support* dan *gap filler* dalam mendukung Pemerintah untuk penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai konsekuensi adanya hubungan koordinasi yang kuat dengan pelaksanaan program yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana yang dibiayai oleh rupiah murni. Oleh karena itu, diperlukan adanya arahan-arahan kebijakan yang lebih kontinu dari BNPB agar pelaksanaan kegiatan yang dibiayai IDF bisa selalu sejalan dengan arahan kebijakan BNPB dan sesuai dengan progres/dinamika pelaksanaan penanggulangan bencana. Berkaitan dengan hal ini diperlukan adanya penguatan koordinasi pelaksanaan antara kegiatan yang dibiayai IDF dengan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Agar IDF dapat bergerak secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, perlu juga didukung dengan adanya SOP yang lebih sederhana dan fleksibel agar proses-proses yang dilakukan tidak membutuhkan waktu yang lama. Sistem perencanaan dan penilaian usulan kegiatan perlu lebih disederhanakan, *monev* perlu dilakukan dengan lebih sistematis dan menghubungkan antara *monev* kebencanaan dan *monev* PHLN. Kelembagaan IDF juga perlu ditataulang agar lebih fleksibel.

Mekanisme koordinasi dengan mitra pembangunan, *administrative agent* dan *trustee* juga perlu untuk mendapatkan perhatian agar terjalin koordinasi yang lebih kuat. Dalam rangka

peningkatan koordinasi dan penguatan Sekretariat IDF dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah dilakukan kegiatan seperti:

- 1) Pertemuan koordinasi rutin internal sekretariat dilaksanakan minimum satu kali dalam satu bulan dengan dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan Wakil Kepala Sekretariat.
- 2) Pertemuan koordinasi tambahan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan arahan Kepala Sekretariat.
- 3) Koordinasi rutin internal untuk membahas progress pelaksanaan program kerja Sekretariat IDF, termasuk membahas permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya.
- 4) Koordinasi rutin dengan kementerian/lembaga, mitra pembangunan, *Trustee*, *Administrative Agent*, lembaga pelaksana dan pemerintah daerah.
- 5) Melaporkan hasil pertemuan koordinasi internal dilaporkan kepada Ketua Tim Teknis untuk ditindaklanjuti.
- 6) Penyusunan rencana kerja Sekretariat IDF.

Pada tahun 2015, beberapa kegiatan rapat koordinasi dan penguatan Sekretariat yang dilakukan adalah:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pertemuan Tim Pengarah IDF	4 Desember 2015
2.	Pertemuan Tim Teknis IDF	25 Juni 2015 & 17 November 2015
3.	Rapat koordinasi persiapan IDF dalam event <i>Bulan Pengurangan Risiko Bencana</i> di Solo pada 14-17 Oktober 2015.	14-17 Oktober 2015
4.	Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Kelud di Surabaya-Jawa Timur	6-7 Agustus 2015
5.	Project Board Meeting (PBM) UNJP Sinabung di Medan-Sumatera Utara	9-10 Juli 2015
6.	Project Board Meeting (PBM) UNJP Kelud di Kediri-Jawa Timur	6-7 Juli 2015
7.	Rapat Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat IDF di Bandung-Jawa Barat	4-5 Juni 2015
8.	Pembahasan <i>Draft Project Concept Note</i> window Bank Dunia untuk dukungan pemulihan Sinabung dan Manado.	17 Mei 2015

No.	Kegiatan	Waktu
9.	Pembahasan Inception Report Programme Document UNJP Kelud di Kota Malang	24 Maret 2015
10.	Workshop Penyusunan <i>Project Paper window</i> Bank Dunia untuk Dukungan Pemulihan Sinabung, Manado dan <i>non-recovery intervention</i> di Bandung-Jawa Barat.	20-21 Maret 2015
11.	Koordinasi mekanisme pelaporan dan pengadministrasian hibah dengan BNPB dan Kementerian Keuangan.	29 Januari 2015 & 1 April 2015

Selain kegiatan diatas, Sekretariat juga melakukan pertemuan-pertemuan internal dan eksternal dalam rangka:

1. Persiapan pelaksanaan rapat-rapat Tim Teknis dan Tim Pengarah IDF tahun 2015
2. Finalisasi Standar Operasional Prosedur IDF.
3. Koordinasi mekanisme pelaporan dan pengadministrasian hibah dengan BNPB dan Kementerian Keuangan.
4. Pembahasan usulan perpanjangan (No-cost extension) pelaksanaan UNJP Sinabung dan Kelud.

3.2. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan IDF

Dalam pelaksanaannya IDF terus menekankan untuk membangun dan memperkuat sinergi antara kegiatan-kegiatan yang baik yang dilakukan melalui window UN dan window Bank Dunia maupun dengan program/kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengalaman di Mentawai dan Merapi, sinergi antar kegiatan yang dilaksanakan oleh UN dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Dunia merupakan pembelajaran yang perlu diperkuat dalam kerangka dukungan penguatan penanggulangan bencana di Indonesia, walaupun hal tersebut tidak mudah dilaksanakan. Dimana, masing-masing lembaga mempunyai sistem dan prosedur yang berbeda-beda. Demikian halnya dengan fokus dan arahan kebijakan masing-masing dalam melakukan operasi kerjasamanya di Indonesia.

Hal berikutnya adalah menciptakan koordinasi dan hubungan kerja dengan mitra pembangunan, pemerintah daerah agar program yang sudah dibangun dapat melembaga dan berkesinambungan. Mekanisme koordinasi dan kerja antara UNJP, Rekompak dan pemerintah daerah terkait perlu untuk terus diperkuat. Mekanisme koordinasi yang dilakukan perlu dari awal dibangun agar perencanaan dan implementasi dari program-program yang ada dapat diinternalisasi oleh setiap SKPD terkait. Mekanisme koordinasi terdiri dari Tim Teknis,

pelaksana program, SKPD dan juga mitra pembangunan dalam bentuk Project Board Meeting (PBM) terkait lainnya untuk memudahkan koordinasi dalam pencapaian hasil-hasil program serta menjaga sinergitas dengan program lainnya. Pertemuan rutin dilakukan setiap per triwulan untuk memantau perkembangan capaian pelaksanaan di kedua pasca bencana tersebut.

Forum koordinasi sejak awal sudah dibangun dengan semua pihak, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan IDF dengan maksud untuk mengoptimalkan hasil dan pencapaian sasaran. Berhubung alokasi pendanaan IDF tidak signifikan, dukungan IDF harus tetap dapat menunjukkan perannya sebagai katalis dan gap filler yang benar-benar bermanfaat dan mendukung penguatan pemulihan pasca bencana.

3.3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan IDF

IDF berfungsi sebagai pengisi kesenjangan (*gap-filler*), katalisator dan komplemen program Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Pada tahun 2015, dukungan IDF difokuskan untuk pemulihan di Sinabung, Kelud dan Manado. Dalam melaksanakan perannya tersebut, IDF telah berkontribusi dalam membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah pasca bencana di Kepulauan Mentawai dan pasca letusan gunung Merapi di Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, IMDFF-DR juga turut menyumbang kontribusi IMDFF-DR diharapkan menjadi katalis kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama bagi pemulihan ekonomi masyarakat korban bencana.

UN Joint Programme Sinabung dengan lembaga pelaksana FAO, ILO dan UNDP maupun *Joint Program* Kelud yang dilaksanakan oleh UNDP dan FAO, dalam melaksanakan kegiatan tetap mengedepankan pendekatan programatik yang telah disepakati bersama dan terkoordinasi dalam upaya mendukung kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam proses pemulihan masyarakat yang terkena dampak bencana di wilayah sekitar Gunung Sinabung, Gunung Kelud dan Manado. Program ini diharapkan dapat mengisi *gap* dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi RR) yang telah disusun pemerintah. Disamping itu, dalam desain dan pelaksanaan kegiatan, program ini juga diharapkan dapat memainkan peranan sebagai katalisator dengan menginisiasi berbagai kegiatan yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat, guna meletakkan fondasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan pemulihan selanjutnya. Dari serangkaian kegiatan yang direncanakan, beberapa kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemui beberapa hambatan dan permasalahan, yang dapat

memperlambat proses pemulihan di kedua wilayah tersebut. Berikut ini dipaparkan beberapa capaian, serta hambatan maupun pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan UNJP Sinabung, UNJP Kelud dan Manado.

3.4. Pelaksanaan Program Dukungan Pemulihan di Sinabung

Hingga saat ini Gunung Sinabung terus menunjukkan aktivitas vulkanik dan masih ditetapkan dengan status waspada tingkat 3. Kondisi tersebut memaksa warga sekitar Gunung Sinabung yang berada pada kawasan rawan bencana (KRB) 3 masih menetap di titik-titik pengungsian. Diperkirakan masih terdapat sekitar 3.287 jiwa masih mengungsi yang tersebar di beberapa titik pengungsian. Sejumlah 6.179 pengungsi (2.053 KK) dari 7 desa telah diberikan bantuan dana untuk menyewa perumahan sementara (rumah sewaan dan lahan pertanian).

Berdasarkan kebijakan pemulihan yang tertuang dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Sinabung, proses pemulihan akan dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu:

1. Tahap pertama, relokasi dan pembangunan rumah bagi 370 KK dari 3 desa: Bekerah, Sukameriah dan Simacem.
2. Tahap kedua, relokasi dan pembangunan rumah bagi 1.683 KK dari 4 desa, Berastepu, Guru Kinayan, Gamber dan Kuta tonggal.
3. Tahap ketiga, pelaksanaan pemulihan bagi desa-desa yang terdampak dan yang tidak direlokasi, total 25 desa
4. Tahap keempat, pelaksanaan pemulihan bagi 648 KK dari 4 desa (Jeraya, Kuta Tengah, Pintu Besi dan Tiga Pancur) yang berpotensi untuk direlokasi. Akan tetapi untuk pelaksanaan fase terakhir ini masih diperlukan waktu yang panjang dan pertimbangan lebih lanjut serta rekomendasi dari PVMBG untuk menyertakan 3 desa tambahan untuk relokasi yaitu Mardinding, Sukanalu dan Sigarang-garang. Dalam konsultasi publik terkait rencana relokasi untuk desa yang berpotensi, BNPB telah menyampaikan bahwa proses relokasi akan membutuhkan waktu 3-5 tahun. Sehingga, BNPB telah meminta untuk membangun perumahan sementara yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 21/2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Saat ini BNPB dan TNI telah menyelesaikan pembangunan rumah tahap I sebanyak 370 unit di Siosar yang berjarak sekitar 32 km dari Kabanjahe. Namun, masih banyak yang belum ditempati dan masih tinggal diluar Siosar karena belum tersedianya lahan pertanian. Hingga saat ini baru

21 unit rumah yang baru ditempati oleh korban. BNPB telah membentuk Tim Pendamping Nasional (TPN) yang bertugas untuk membantu BNPB dalam mendorong masyarakat agar bersedia menempati rumah yang telah dibangun di Siosar.

Hingga November 2015, UNJP Sinabung telah berkontribusi dengan memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Karo dalam pemulihan Sinabung dengan fokus dukungan penguatan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Karo (Output 1 dan 2), pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang terkena dampak (Output 3) dan pelaksanaan pemulihan dengan pendekatan pengurangan risiko bencana (Output 4).

United Nations Development Programme (UNDP)

UNDP telah melaksanakan serangkaian kegiatan lokakarya guna fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sinabung, termasuk koordinasi dan perencanaan kegiatan agar masuk dalam program dan anggaran yang akan dilaksanakan di tahun 2015. Forum koordinasi di Kabupaten Karo dilaksanakan dan berfokus pada penyusunan program RR dan penguatan koordinasi kelembagaan RR, sementara ditingkat provinsi difokuskan pada peningkatan kesadaran pemangku kepentingan provinsi untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR). Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten secara terpadu. *Piloting* direncanakan akan dikembangkan di 27 Desa dimulai pada November 2015. Di tingkat provinsi, kerjasama UNJP Sinabung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk mewujudkan tiga fungsi utama, yaitu, penelitian dan review, koordinasi dan monitoring; dukungan penyusunan rencana strategi kesiapsiagaan menghadapi bencana, *road map* pelaksanaan strategi kesiapsiagaan bencana; pemetaan dan koordinasi *stakeholders* yang terkait dengan pemulihan pasca-bencana, telah didisusun dan dijadwalkan di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi yang akan dilaksanakan dengan melalui Letter of mekanisme Agreement (LoA). Dimana kerangka LoA kerangka telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh UNJP Sinabung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BPBD Provinsi Sumatera Utara) dan Pemerintah Kabupaten Karo (BPBD Kabupaten Karo).

Food and Agriculture Organization (FAO)

Pelaksanaan kegiatan dukungan pemulihan yang dilaksanakan oleh FAO mengalami keterlambatan akibat aktivitas vulkanik Gunung Sinabung yang masih terus terjadi dan status Gn. Sinabung yang masih ditetapkan pada level waspada. Proses relokasi yang masih berlarut-larut menjadi kendala dalam penentuan daerah intervensi, kesiapan masyarakat dan ketersediaan lahan pertanian menghambat kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan. Pada November 2015, FAO telah melakukan value chain analysis (VCA) untuk menentukan 3

komoditas yang akan diintervensi di sekitar Sinabung dan Siosar. Sejauh ini masih pada tahapan pengumpulan data, koordinasi dengan pemerintah setempat dan diharapkan akan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2015. Hasil VCA ini akan disosialisasikan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten Karo, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah.

Bentuk dukungan lainnya adalah pengenalan konsep pertanian dan peternakan terpadu sesuai dengan hasil VCA; pembentukan demplot untuk komoditas berdasarkan hasil VCA; pembentukan forum koordinasi bidang pemulihan ekonomi dan pelatihan penguatan kapasitas dalam pemulihan ekonomi dan pemaduan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan aspek pengurangan risiko bencana.

International Labour Organization (ILO)

Sejauh ini dukungan yang diberikan oleh ILO adalah penguatan kapasitas dan keterampilan dalam kewirausahaan dan pelatihan manajemen keuangan wirausaha. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dan usaha mikro dalam pengelolaan keuangan dan merencanakan usaha. Hal ini juga berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat yang terkena dampak dan pemerintah daerah sebelum mereka menerima dana besar dari RENAKSI. Pelatihan dilakukan melalui Training of Trainers (ToT), yaitu ToT pada pendidikan keuangan bagi keluarga telah dilaksanakan pada bulan Mei 2015 dan ToT pengembangan keterampilan kewirausahaan dilakukan pada bulan November 2015. ToT ini dilakukan selama 5 hari dan dihadiri oleh 20 peserta dari SKPD terkait, LSM dan lembaga keuangan. Pelatihan juga dilakukan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak. Pelatihan pendidikan keuangan bagi keluarga dilakukan pada bulan Juni 2015 dan dihadiri oleh 100 keluarga dari 7 desa yang direlokasi, dan pelatihan pengembangan keterampilan kewirausahaan dilakukan pada bulan November 2015 dan dihadiri oleh 80 pelaku UMK dari desa-desa yang terkena dampak. Masyarakat atau penerima manfaat yang telah mengikuti ToT akan bertindak sebagai fasilitator pelatihan, strategi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kapasitas dan pengetahuan tetap berada pada masyarakat setempat.

Output 1: Meningkatnya kapasitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan pemulihan awal dan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.

1. Capaian

- Telah dilaksanakan serangkaian workshop, pertemuan dan diskusi untuk membangun koordinasi antar berbagai pihak, termasuk pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemulihan di sekitar Gunung Sinabung dan Siosar. Sejauh ini UNJP telah

melaksanakan 2 kegiatan koordinasi dalam rangka Konsolidasi Pelaksanaan RENAKSI, selanjutnya dukungan pelaksanaan koordinasi pemulihan didelegasikan kepada Daerah BPBD melalui mekanisme LoA dengan BPBD Kabupaten Karo akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 dan diharapkan selesai sesuai dengan siklus proyek.

- Membentuk forum multi-stakeholder melalui fasilitasi Sekretariat Bersama (Sekber) di BPBD Karo. Forum koordinasi ini belum berjalan dengan intensif dan efektif sebagaimana yang diharapkan karena pelaksanaan kegiatan pemulihan yang tertuang dalam RENAKSI belum berjalan.
- Saat ini LoA antara UNDP dan BPBD Provinsi Sumut dan BPBD Kab. Karo telah ditandatangani, sehingga koordinasi awal dengan berbagai pihak sudah bisa dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Forum koordinasi ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi dalam menjembatani pemecahan terhadap kemungkinan kendala-kendala yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan dilapangan.

2. Komponen Keberlanjutan

- Mekanisme LoA digunakan untuk pelaksanaan Output 1 dan 2, dimana UNDP bekerja sama dengan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan BPBD Kabupaten Karo. Melalui LoA, UNDP akan memberikan bantuan teknis kepada BPBD yang akan difokuskan pada pendekatan pembelajaran serta berbagi pengalaman dan pengetahuan. Saat ini dana LoA sudah disalurkan kepada BPBD Karo dan BPBD Provsu untuk melaksanakan kegiatan dan mengambil peran dan fungsi sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan pemulihan yang terlibat. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Karo yang telah direncanakan dalam LoA, antara lain:
 - Konsultasi Publik
 - Pertemuan koordinasi dengan Sektor Kementerian/Lembaga terkait
 - Diseminasi informasi kepada DPRD Kabupaten Karo

Gambar 3. 1: Workshop UNDP dan BPBD Karo dalam Pelaksanaan Renaksi RR dan Liputan media



Workshop UNDP dan BPBD Karo dalam Pelaksanaan Renaksi RR



Liputan media pada pelaksanaan Workshop dan deklarasi stakeholder di Kantor Sekretariat Bersama di BPBD Karo.

3. Tantangan

- Erupsi Gn. Sinabung yang masih terus berlangsung sangat menyita sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah terutama untuk kegiatan tanggap darurat dan hal ini menghambat proses pemulihan. Letusan yang masih terus terjadi menempatkan pendanaan pemulihan Sinabung menjadi dilema antara pendanaan pada fase Tanggap Darurat dan fase pemulihan. Pada fase Tanggap Darurat memungkinkan untuk menggunakan dana On-Call yang dapat diakses dengan segera untuk memberikan bantuan langsung kepada korban, sementara fase pemulihan (recovery) tidak memiliki ketentuan hukum yang memungkinkan dapat segera menggunakan anggaran yang ada masing-masing kementerian/lembaga untuk mendukung pemulihan karena dengan persepsi bahwa pemulihan dapat dilakukan setelah kejadian bencana diselesaikan atau kondisi normal artinya semua mekanisme perencanaan maupun penganggaran mengikuti mekanisme normal. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah berusaha menyusun peraturan yang memungkinkan kegiatan pemulihan awal didanai menggunakan dana On-Call. Hal ini diharapkan dapat diupayakan sebagai skenario ideal untuk situasi di Sinabung saat ini.
- Tingginya rotasi pejabat di daerah mengakibatkan proses diseminasi menjadi berulang-ulang dan kemungkinan perubahan kebijakan sesuai dengan persepsi dari pejabat baru.
- Hingga November 2015, meskipun RENAKSI telah selesai disusun, namun belum ada kejelasan kapan RENAKSI tersebut akan ditetapkan, kejelasan mengenai aktivasi fase

rehabilitasi dan rekonstruksi Sinabung dan Rekonstruksi dan kepastian pencairan dana RR untuk kegiatan pemulihan.

Output 2: Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Capaian

Rapat Koordinasi terkait penilaian awal, penilaian dan pemetaan kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah dilaksanakan. Dokumen RENAksi belum ditandatangani dan diaktifkan. Rentang Waktu yang panjang sejak draft RENAksi selesai disusun hingga aktivasi dapat menyebabkan program/kegiatan dalam RENAksi sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebutuhan (PDNA) RR kembali.

Pelaksanaan proses program pemulihan, review perencanaan dan pelaksanaan, menggunakan mekanisme LoA. Saat ini dana LoA sudah dicairkan, BPBD Provinsi Sumut sudah merencanakan dan melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan ini. BPBD Provinsi Sumut akan melakukan audit sosial, dukungan penguatan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah (BPBD) dalam review kegiatan. Setiap review terdiri dari tiga sub-kegiatan; Konsultasi publik untuk memastikan komitmen dari setiap pemangku kepentingan untuk menyediakan data, Pelaksanaan review / survei dan Diseminasi hasil review. BPBD Karo, akan melakukan lokakarya tentang Kebijakan pendanaan; Penataan Organisasi yang terkait dengan penanganan ancaman bencana Gn. Sinabung sebagai permanent hazard; dan dukungan penyusunan peraturan daerah untuk Rencana Penanggulangan Bencana. Pelatihan untuk pemrograman pemulihan melalui penelaahan PDNA dan penyusunan kegiatan dalam RENAksi.

Serangkaian workshop diseminasi & konsolidasi Pelaksanaan RENAksi telah dilakukan dengan melibatkan SKPD pemerintah daerah dan pelaku pemulihan lokal (INGO/ NGO) untuk menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Nasional terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Letusan Gunung Sinabung. Mengingat direktif dari BNPB untuk mempercepat hunian permanen di Siosar, agenda utama forum koordinasi ditekankan pada menemukan faktor-faktor yang memungkinkan untuk meningkatkan hunian di Siosar dan salah satu pendekatan yang disepakati adalah untuk meningkatkan pemulihan mata pencaharian masyarakat yang direlokasi. Untuk tujuan ini, komitmen telah dibuat dengan beberapa LSM untuk mendukung kebutuhan pemulihan mata pencaharian di semua daerah yang terkena dampak serta relokasi berada di Siosar.

2. Komponen Keberlanjutan

Selain kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, forum koordinasi telah dibentuk untuk memfasilitasi koordinasi antar pelaku pemulihan, termasuk berbagai tingkat lembaga pemerintah serta organisasi masyarakat sipil, LSM dan kelompok pemuda. Forum koordinasi ini dipimpin oleh kapasitas lokal sebagai strategi untuk mengembangkan kapasitas mereka dan membangun jaringan dengan pelaku yang berbeda. Dengan adanya peluang kemitraan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan dan mempromosikan kapasitas sumber daya lokal dalam melakukan pemulihan di Sinabung. Sekber (Sekretariat Bersama Sinabung) sekarang beroperasi sebagai titik pertemuan Koordinasi dan berbagi informasi dari berbagai pelaksana program pemulihan yang terkait di Sinabung.

Gambar 3. 2: Pertemuan dengan UNJP dan Komunitas di Kantor Sekber di BPBD Karo serta Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sumut dan BPBD Kabupaten Karo



Pertemuan dengan UNJP dan Komunitas di Kantor Sekber di BPBD Karo.



Koordinasi BPBD Provinsi Sumut, BPBD Kab. Karo terkait pelaksanaan Renaksi RR

3. Tantangan

Keterbatasan pedoman dan arahan bagi UNJP dalam pelaksanaan program pemulihan Sinabung baik dari tingkat nasional maupun daerah (ketiadaan RENAKSI). Sementara itu sumber daya lokal untuk melakukan pemulihan secara mandiri masih terbatas sehingga intervensi pemerintah nasional diperlukan namun masih terkendala dengan ketidakpastian RENAKSI.

Potensi tumpang tindih dan peran antara BPBD, TPN, Tentara Nasional, dan Satuan Tugas Nasional untuk Relokasi Siosar (SATGAS Percepatan). Penguatan Kemitraan dan pengembangan kapasitas lokal. Membangun hubungan, mempromosikan keterlibatan, dan memfasilitasi forum koordinasi/konsultasi untuk memetakan dan menegaskan kembali pemangku kepentingan regional dan / atau pelaku utama bersama dengan fungsi kelembagaan dan peran untuk

memastikan sumber daya yang efektif dan manajemen proyek. Salah satu yang sangat mendesak adalah dukungan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan SOP, penguatan kebijakan; potensi hambatan yang mungkin ditemui terkait tanggung jawab pemda di lokasi relokasi di Siosar sebagai sub-ordinat dari SATGAS Percepatan.

Tidak ada perbedaan yang jelas antara kebijakan Keputusan Presiden untuk Satuan Tugas Nasional dan RENAKSI. Berhubung RENAKSI belum ditandatangani, diasumsikan bahwa Keputusan Presiden ini akan digunakan sebagai pedoman proses pemulihan di Sinabung. Kemungkinan penandatanganan RENAKSI akan tertunda kembali sampai perkembangan lebih lanjut dari Keputusan Presiden ini dan kebijakan dari BNPB. Situasi dengan ketidakjelasan akan berdampak terhadap komitmen kementerian/lembaga dalam mendukung Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sinabung yang telah dirumuskan dalam rancangan RENAKSI sebelumnya.

Sensitivitas politik yang sedang berlangsung dari situasi pemulihan di Sinabung dan dukungan RENAKSI telah menyebabkan berbagai pendekatan yang berbeda dalam melaksanakan kegiatan pemulihan di Sinabung. RENAKSI tetap menjadi salah satu jalur yang paling mungkin untuk memberikan bantuan dana pemulihan.

OUTPUT 3 – Pemulihan Mata Pencaharian dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

1. Capaian

FAO telah mulai melaksanakan Value Chain Analysis (VCA) untuk komoditas dan aktivitas mata pencaharian yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung. Kegiatan ini dimulai pada minggu ke-2 bulan November 2015 dan diproyeksikan akan selesai pada minggu ke-2 Desember 2015 untuk hasil dan temuan presentasi melibatkan mitra lokal untuk menyebarkan dan memperoleh masukan yang diperlukan. Berdasarkan hasil VCA telah dihasilkan 3 (tiga) komoditas yang akan dikembangkan yang tahan terhadap abu vulkanik yaitu kopi, jeruk dan pisang di tiga lokasi prioritas (Cimbang, Ujung Payung, dan Siosar).

Diseminasi hasil VCA direncanakan 10 Desember 2015. Workshop akan diadakan di Medan dan diikuti oleh kepala desa yang terkena dampak, pemerintah terkait di Provinsi dan Kabupaten, sektor swasta dan organisasi non pemerintah. Berdasarkan temuan VCA, FAO akan mengembangkan dan melaksanakan pelatihan untuk mempromosikan praktek pertanian yang baik dari kopi di Sinabung daerah yang terkena.

Kegiatan lain untuk masyarakat yang direlokasi di Siosar adalah demplot pertanian ayam organik yang berfungsi sebagai sumber alternatif mata pencaharian sambil menunggu ketersediaan lahan pertanian. Distribusi input komoditas yang dipilih akan disebut VCA hasil

dan Panduan untuk Penilaian Penerima Hasil Intervensi Pertanian Darurat oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

ILO telah melakukan serangkaian pelatihan untuk manajemen keuangan dan kewirausahaan. Kegiatan ini dilakukan melalui Training of Trainers dan Pelatihan Penerima Manfaat Kewirausahaan Pengembangan Keterampilan menggunakan modul ILO tentang GET Ahead, dan Pendidikan Keuangan untuk Keluarga. Pelatihan untuk pelatih dihadiri oleh pejabat pemerintah terkait, LSM dan lembaga keuangan, dan pelatihan dari penerima manfaat dihadiri oleh keluarga dan UMK dari desa-desa yang terkena dampak. Pelatihan bagi keluarga dan UMK yang difasilitasi oleh pelatih lokal yang telah berpartisipasi dalam ToT dan strategi ini akan memastikan kapasitas dan pengetahuan tetap di masyarakat setempat.

Jumlah peserta mengikuti pelatihan dari pelatih tentang Pendidikan Keuangan untuk Keluarga yang 20 peserta terdiri dari 8 laki-laki dan 12 perempuan, dan pelatihan pengembangan keterampilan kewirausahaan yang dihadiri oleh 20 peserta terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan (16 dari 20 peserta telah mengikuti kedua latihan).

ILO telah melatih 80 orang (47 perempuan) dari 200 yang ditargetkan (40%) pada pengembangan keterampilan kewirausahaan menggunakan modul ILO tentang GET Ahead, dan 100 orang (77 perempuan) dari 100 yang ditargetkan (100%) pada pendidikan keuangan bagi keluarga dari 7 desa direlokasi. Target yang tersisa pada pelatihan pengembangan keterampilan kewirausahaan direncanakan akan selesai pada akhir Februari 2015.

Gambar 3. 3: ToT Pengelolaan Keuangan dan ToT Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan oleh ILO



ToT Pengelolaan Keuangan kepada keluarga



ToT Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan menggunakan modul ILO GET Ahead

2. Keberlanjutan Komponen

Keterlibatan dalam Sekretariat Bersama akan memberikan pengembangan kapasitas untuk koordinasi ini di daerah mata pencaharian yang berkelanjutan di daerah pasca bencana, pengembangan organisasi, analisis sosial dan mobilisasi sumber daya.

3. Tantangan

Berhubung belum tersedianya lahan pertanian dan pembangunan fasilitas umum (sekolah, klinik medis dan fasilitas umum lainnya) belum selesai mengakibatkan sebagian besar masyarakat yang telah menerima rumah permanen di Siosar masih enggan untuk menempatnya, hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan proyek.

Karena sebagian besar masyarakat dari 7 desa direlokasi terutama 3 desa direlokasi yang telah menerima rumah permanen tidak lagi tinggal di kamp atau rumah permanen di Siosar, ini telah menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi, sosialisasi, penilaian dan bantuan yang berkaitan dengan kegiatan proyek.

Aktivitas vulkanik yang terus menerus, status waspada, dan proses pemukiman kembali yang berlarut-larut berdampak terhadap jangka waktu pelaksanaan, pemilihan daerah intervensi, kesiapan penerima manfaat, dan ketersediaan lahan pertanian pertanian.

Gambar 3. 4: Pelatihan Manajemen Keuangan Keluarga dan Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan



Output 4: Penerapan pengurangan risiko bencana dalam langkah-langkah pemulihan

1. Capaian

Penilaian awal dari Sistem Informasi Desa telah dilakukan di 27 desa yang terkena dampak; 5 desa yang terkena dampak lahar dingin dingin (Mardinding, Perbaji, Sigaranggarang, Sukatendel dan Kutambaru), 15 desa yang terkena dampak abu gunung berapi (Sukanalu, Temburun, Pintu Besi, Slandi, Jeraya, Payung, Lau Kawar, Tiga Pancur, Kuta Rakyat, Naman, Tiganderket, Tj Morawa, Kuta Gugung, Kuta Tengah) dan 7 desa direlokasi (Sukameriah, Bekerah, Simacem, Berasitepu, Kutatonggal, Gurukinayan).

VIS akan berfungsi sebagai data dan instrumen kesiapan informasi, tidak hanya untuk tujuan manajemen risiko bencana seperti untuk mendukung EWS dan contingency plan tetapi juga bisa melayani kebutuhan dalam pembangunan reguler. Misalnya untuk mendukung perencanaan pembangunan desa dengan data potensi desa dan demografi. VIS sistem akan diadopsi dari VIS di Merapi dengan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan konteks lokal di Sinabung.

SIRPO dan BPBD Karo sedang dalam proses mengembangkan strategi untuk pengumpulan data dan selanjutnya akan melaksanakan lokakarya Konsultasi publik tentang pentingnya Sistem Informasi Desa. Lokakarya konsultasi akan dikombinasikan dengan BPBD Karo hasil review ditargetkan untuk memberikan umpan balik ke tombo-aktor yang relevan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penilaian awal lainnya untuk mengidentifikasi desa-desa yang berisiko tinggi dari banjir lahar dingin telah dilakukan. 7 desa yaitu Mardinding, Sukatendel, Perbaji, Sigaranggarang, Temburun, Selandi, dan Kutambaru diidentifikasi berpotensi terkena banjir lahar dingin. PVMBG menunjukkan bahwa Sigaranggarang dan Mardinding mungkin pindah karena lokasi yang dekat dengan puncak, memiliki resiko yang sangat besar dari letusan di masa depan (terus erupsi) serta banjir lahar dingin.

Mengacu pada keluaran 4, FAO akan melakukan lokakarya dengan topik mengintegrasikan ukuran pengurangan bencana di pertanian. Tujuan dari kegiatan ini: (a) Untuk memahami Kerangka Kebijakan Untuk PRB di Pertanian mengacu Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015, Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat, Rencana Aksi Nasional Equity Resiko Bencana (2010-2014) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010-2014. (b) Untuk memperkirakan Loss Pertanian Karena Bencana, Tanaman dan Ternak (Loss dan Kekambuhan). (c) Sumber Daya mengalir untuk pemulihan pasca bencana pertanian.

2. Keberlanjutan Komponen

Menempatkan tindakan-tindakan kesiapan untuk risiko yang muncul (banjir lahar dingin) di masyarakat. Pendekatan ini akan dilakukan melalui pengembangan rencana kontingensi untuk memungkinkan masyarakat melakukan tindakan mitigasi risiko ketika bencana terjadi dan Sistem Informasi Desa untuk memastikan ketersediaan data dasar yang relevan dan informasi untuk intervensi respon dan pemulihan bila diperlukan.

3. Tantangan

Akses terbatas ke beberapa wilayah sasaran penilaian karena aktivitas peningkatan di Gunung Sinabung. Menanggapi situasi ini SIRPO telah melakukan penyesuaian wilayah sasaran, kerangka waktu, pendekatan penilaian dan menilai kemungkinan untuk merancang strategi khusus untuk desa-desa yang mungkin berpotensi direlokasi seperti pengenalan inisiatif CBDRM.

Keputusan untuk merelokasi kedua desa tidak teguh belum karena keduanya tidak termasuk dalam program relokasi RENAKSI sehingga termasuk mereka dalam pembangunan CP tidak akan efektif. SIRPO akan fokus untuk memfasilitasi pengembangan CP di 5 desa dan mengeksplorasi kemungkinan untuk melakukan pengembangan kapasitas CBDRM untuk 2 masyarakat direlokasi mungkin seperti itu mereka akan memiliki kesempatan untuk menerapkan kegiatan CBDRM di daerah direlokasi.

3.5. Pelaksanaan Program Dukungan Pemulihan di Kelud

Output 1. Kapasitas nasional dan lokal untuk mengkoordinasikan pemulihan dini pascabencana dan pemulihan langkah-langkah yang diperkuat.

1. Memfasilitasi BPBD untuk melakukan rapat koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan.

Sampai akhir tahun 2015, target output 1 telah dicapai. Forum koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan untuk kabupaten dan tingkat provinsi telah dilakukan. BNPB, kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten, masyarakat sipil dan sektor swasta yang terlibat dalam empat pertemuan koordinasi tingkat kabupaten dan 2 koordinasi tingkat provinsi. Setidaknya 3 forum koordinasi di setiap 3 kabupaten dan 1 koordinasi forum di provinsi yang telah dilakukan melibatkan, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, perwakilan masyarakat sipil dan sektor swasta di bawah kepemimpinan pemerintah daerah setempat dengan dukungan teknis oleh BNPB.

BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur, Kabupaten BPBD telah sepakat untuk melakukan pendekatan pemulihan dari paket pemulihan khusus yang disebut RENAksi menjadi pendekatan rekonstruksi dan rehabilitasi reguler. BNPB telah setuju untuk mendukung rekonstruksi jembatan di Ngantang Kecamatan di Malang dan instalasi air di Garum Kecamatan di Blitar. Dukungan dilaksanakan melalui mekanisme hibah rehabilitasi dan rekonstruksi reguler untuk tahun 2015. Namun karena semua prosedur yang harus diterapkan, kegiatan baru akan dapat dimulai pada tahun 2016. Mekanisme ini lebih akuntabel dan transparan tetapi beban administrasi lebih tinggi untuk BPBD sebagai koordinasi pelaksana kegiatan. Untuk pelaksanaan dan pemantauan program rehabilitasi dan rekonstruksi reguler di Malang dan Blitar akan dilaksanakan 2016.

Gambar 3. 5: Kerusakan infrastruktur desa (jembatan dan bendungan) akibat material vulkanik dan lahar dingin di Sungai Konto di desa Pandansari, Ngantang Kecamatan, Kabupaten Malang.



Tindak lanjut agenda untuk kegiatan ini adalah rapat koordinasi untuk pelaksanaan dan pemantauan program rehabilitasi dan rekonstruksi reguler di Malang dan Blitar yang harus dilaksanakan tahun 2016. Dan dukungan untuk BPBD Kabupaten Kediri harus dilanjutkan untuk merumuskan usulan untuk mekanisme RR reguler.

2. Dukungan teknis dan administratif diberikan kepada BPBD setempat untuk koordinasi multipihak dan pertukaran informasi

UNDP telah memberikan dukungan kepada BPBD Malang, Blitar dan Kediri untuk merumuskan usulan skema RR reguler yang didanai oleh BNPB. UNDP juga memberikan dukungan kepada

BPBD untuk bantuan teknis dan sosialisasi PMK 162/2015 mengenai Bantuan Hibah dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Daerah

Gambar 3. 6: Pertemuan pada perumusan usulan skema RR biasa didanai oleh BNPB yang diikuti oleh kabupaten Kediri, Blitar & Malang BPBD



BPBD Kabupaten Malang dan BPBD Kabupaten Blitar telah menunjukkan peningkatan kapasitas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi baik dari sisi penyusunan, implementasi dan monitoring. Sementara BPBD Kabupaten Kediri yang baru dibentuk masih memerlukan dukungan lebih lanjut untuk merumuskan usulan rehabilitasi dan rekonstruksi. Di sisi lain, BPBD Malang dan Blitar juga menunjukkan kapasitas koordinasi yang baik untuk mengkonsolidasikan program pemulihan antar SKPD. Sementara BPBD Kediri masih membutuhkan dukungan lanjutan untuk mengkonsolidasikan dukungan pemulihan dari SKPD terkait di Kediri. Bantuan teknis harus dilanjutkan sampai tahun 2016 untuk pelaksanaan dukungan RR reguler dari BNPB dan pelaksanaan RR terkait proyek-proyek pemerintah yang didanai dari APBD.

Output 2. Kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemulihan pasca-bencana yang diperkuat

1. Melakukan lokakarya dan konsultasi untuk mendukung BNPB, Provinsi Jawa Timur, dan BPBD di tiga kabupaten yang terkena dampak untuk menyesuaikan pelaksanaan program RENAksi.

Rapat koordinasi untuk update RENAksi telah dilakukan Agustus di Surabaya. Update program pemulihan yang akan diimplementasikan dan analisis kebutuhan pemulihan baru. BNPB, Bappenas, Provinsi BPBD dan Kabupaten BPBD serta SKPD relevan telah disepakati untuk mengatasi kebutuhan sebagai prioritas untuk tahun fiskal 2016.

Gambar 3. 7: Lokakarya dan konsultasi untuk mendukung BNPB, Provinsi Jawa Timur, dan BPBD di tiga kabupaten yang terkena dampak untuk menyesuaikan Rencana pelaksanaan program RENAKSI



Beberapa program pemulihan akan dilaksanakan selama tahun fiskal 2016. Dukungan koordinasi lebih lanjut akan diperlukan untuk mensinergikan program kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Malang dan Blitar telah menunjukkan kapasitas yang cukup untuk melakukan koordinasi pemulihan tingkat kabupaten. Sementara Kediri membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas koordinatif melalui penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, Perencanaan Strategis dan perumusan Peraturan Bupati terkait dengan penanggulangan bencana. Di sisi lain, karena kurangnya perhatian dari BPBD Provinsi untuk mendukung proses pemulihan Kelud. Dukungan eksternal untuk koordinasi pemulihan tingkat provinsi masih diperlukan.

Tindak lanjut untuk kegiatan ini adalah:

1. Melanjutkan untuk memberikan bantuan teknis untuk BPBD Malang dan Blitar untuk merumuskan program RR dan integrasi PRB ke program RR untuk 2016 dan 2017.
2. Melanjutkan dukungan kepada BPBD Kediri untuk pelatihan penanggulangan bencana, membangun jaringan dengan legislatif, SKPD dan masyarakat sipil melalui program LoA serta mendukung perencanaan strategis PB.

Output 3. Pemulihan mata pencaharian dan pengembangan ekonomi masyarakat

1. Memfasilitasi BPBD untuk melakukan rapat koordinasi penyusunan konsep, strategi dan implementasi pemulihan ekonomi.
 - a. Rapat Dewan proyek pada tanggal 6 - 7 Juli 2015

Project Board Meeting (PBM) UNJP Kelud telah dilakukan pada tanggal 6-7 Juli 2015 dalam bentuk lokakarya di hari pertama dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi target penerima manfaat. Jumlah peserta untuk hari 1 adalah 28 peserta (19 laki-laki dan 9 perempuan) dan hari 2 adalah 44 peserta (37 laki-laki dan 7 perempuan).

Hasil pertemuan ini adalah:

- FAO akan melaksanakan program sesuai dengan Inception Report
- FAO akan bekerja dengan UNDP di Output 4 untuk mengembangkan rencana penanganan darurat berbasis masyarakat untuk ternak dan sistem informasi terkait pertanian desa.

Gambar 3. 8: Project Board Meeting UNJP Kelud 7-9 Juli 2015 di Kabupaten Kediri



b. Workshop Pemulihan *Livelihoods* diselenggarakan pada 8-9 September 2015 di Surabaya

Pada tanggal 24 Maret 2015 telah diselenggarakan lokakarya awal untuk pembahasan *Inception Report* di Malang. Dengan disetujuinya laporan pendahuluan oleh IDF, kegiatan pemulihan sudah mulai berjalan. Kemudian pada tanggal 06-07 Juli 2015 dilakukan project board meeting. FAO ditunjuk sebagai koordinator UNJP Kelud memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan pemulihan komponen mata pencaharian. Dalam rangka mengkonsolidasikan para pemangku kepentingan dalam pemulihan *livelihoods*, FAO telah mengadakan Lokakarya Pemulihan *Livelihoods* pada tanggal 7-9 September 2015 di Surabaya dengan jumlah peserta untuk pada hari pertama sebanyak 51 peserta (38 laki-laki dan 13 perempuan) dan hari kedua sebanyak 30 peserta (25 laki-laki dan 5 perempuan). Output dari lokakarya ini adalah pemutakhiran data dan informasi upaya pemulihan

ekonomi di Kelud untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan berbagi informasi permasalahan yang ditemui dalam pemulihan mata pencaharian.

Gambar 3. 9: Rapat Koordinasi Pemulihan Bidang Pertanian di Surabaya



2. Mengembangkan Budidaya Pisang (*Musa spp.*) di Kabupaten Kediri

Berdasarkan penilaian dan diskusi dengan Dinas Pertanian setempat, pisang akan dibudidayakan di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung dan Desa Puncu, Kecamatan Puncu. Kegiatan ini sudah dikomunikasikan kepada BPBD Kediri dan Dinas Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri. Pisang dipilih sebagai komoditas yang akan dikembangkan karena pisang lebih tahan terhadap erupsi dan pemeliharaannya yang mudah, tidak memerlukan biaya tinggi dan ketersediaan pasar. Bahan baku untuk olahan makanan lokal, yaitu pisang gethuk. Dinas Pertanian telah mendistribusikan bibit pisang ke petani, tapi hancur akibat erupsi. Oleh karena itu, FAO dan Dinas Pertanian akan bekerja sama untuk mempercepat pengembangan budidaya pisang. FAO akan memberikan pelatihan tentang Good Agriculture Practice (GAP), Good Handling Practice (GHP), pengembangan bisnis dan pemasaran serta didistribusikan 10.000 bibit pisang (Ambon Kuning, Ambon TW dan Raja Nangka). 7.000 bibit tersebut akan didistribusikan kepada petani di Desa Kebonrejo dan 3.000 bibit untuk petani di Desa Puncu. Hingga kuartal 3 tahun 2015, kegiatan ini masih tertunda karena masih musim kemarau.

3. Melakukan Analisis Rantai Nilai Pisang

Sebuah analisis rantai nilai partisipatif akan dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan budidaya pisang (*Musa spp*) (jenis pisang Ambon Kuning, Ambon TW dan Raja Nangka) di Kabupaten Kediri sesuai dengan kebutuhan petani dan masukan dari Dinas Pertanian. VCA ini bertujuan untuk menggali potensi komoditas pisang di Kediri dan kemungkinan untuk memperluas dan mengembangkan budidaya pisang menjadi lebih baik melalui analisis

permasalahan dan kapasitas. Konsultan dari Badan Penyuluhan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur akan melakukan VCA pada awal Desember dan hasilnya akan disampaikan pada Januari 2016.

4. Mengembangkan Ternak Komunal

Capaian utama dalam periode ini adalah kesepakatan tentang jenis ternak, pembentukan tim seleksi, identifikasi vendor dan kesepakatan lokasi kandang komunal. Ternak yang akan diberikan untuk penerima bantuan di Kampung Baru dan Pondokagung adalah "Peranakan Ongole", sementara penerima manfaat dari Desa Pandansari dan Besowo akan menerima domba dan kambing peranakan lokal yaitu Bligon / Jawa Randu Kambing.

Ada tantangan selama pelaksanaan. Perubahan penyedia ternak karena konflik internal. Hal ini mempengaruhi kesepakatan awal antara FAO dan kelompok penerima manfaat. FAO dan Dinas Peternakan akan membahas lagi dengan kelompok penerima manfaat. Tantangan lain adalah perubahan kebutuhan masyarakat di Desa Pandansari, yang semula menginginkan ternak domba berubah menjadi ternak kambing. Hal itu terjadi karena ada sektor swasta akan memberikan bantuan ternak sapi, dimana Petani harus membayar Rp 400.000 untuk mengakses program ini. Banyak petani telah membayar meskipun tidak ada kejelasan mengenai program tersebut. Pemerintah desa dan petani yang ditargetkan telah meminta FAO untuk mendukung domba daripada sapi.

Gambar 3. 10: Lokasi kandang komunal di Besowo Desa dan bantuan ternak kambing yang akan diberikan



5. Pengembangbiakan Burung Hantu (*Tyto Alba*) untuk anti hama tikus di Kabupaten Kediri

Seperti direncanakan dalam laporan awal, FAO telah mendukung pengembangbiakan burung hantu (*Tyto alba*) untuk mengurangi hama tikus di Desa Babadan, Kecamatan Ngancar. Tahap awal telah dilakukan diskusi awal dengan Dinas Pertanian, petani nanas dan para ahli. Kemudian kunjungan ke peternakan burung hantu di Desa Keling, Kecamatan Kepung dan Desa

Cancangan di Kecamatan Cangkringan. Nantinya akan dilakukan kegiatan sosialisasi, diskusi kelompok terfokus, survei lapangan, studi lapangan, kerja lapangan dan bantuan teknis.

Output 4. Penerapan prinsip pengurangan risiko bencana dalam pemulihan.

1. Ketersediaan perangkat lunak MIS/GIS di desa berisiko tinggi dan kabupaten yang terkena dampak untuk mendukung dalam kesiapsiagaan darurat dan pemulihan.

UNDP telah melakukan instalasi software MIS/GIS yang diperlukan di desa-desa risiko tinggi dan 3 kabupaten yang terkena dampak. Tahap awal telah selesai, termasuk sosialisasi, pelatihan untuk pengumpulan data dan input data, pemerintah desa sangat antusias untuk mendukung proses. Pemerintah percaya bahwa sistem akan mendorong kualitas pelayanan publik melalui integrasi basis data kependudukan dan penerbitan dokumen lebih cepat hukum. Di sisi lain, pengembangan sistem juga didukung oleh anggota komunitas di tingkat desa (tim Siaga Bencana) untuk mendukung sistem peringatan dini yang efektif dan basis data pengungsi.

Selama kuartal ini, pengumpulan data dan input data telah dilakukan di 6 desa. Untuk mendukung pelaksanaan VIS, pemerintah desa mendukung penyediaan internet. Tantangannya adalah kurangnya akurasi basis data penduduk yang tersedia. Untuk tim VIS Teamworks harus memperbarui dan mengkonsolidasikan data penduduk di tingkat desa dan tingkat kabupaten.

Gambar 3. 11: Pelatihan Fasilitator VIS di kabupaten Kediri dan Pelatihan VIS input data di desa Modangan, Nglepok Kecamatan, Kabupaten Blitar



Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah:

1. Pengumpulan dan input data untuk mengembangkan basis data penduduk desa.
2. Pelatihan untuk Penerbitan Dokumen.

3. Pelatihan bagi staf pemerintah desa dan Tim Siaga Bencana untuk memelihara *website* desa dan mempublikasikan berita dari desa-desa.

UNDP juga memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan Sistem Informasi Bencana Kabupaten (DDIS), manajemen sistem data, kapasitas, dan kelembagaan. Kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Lokakarya untuk memetakan kebutuhan stakeholder untuk mendukung Sistem Informasi Bencana telah dilakukan di 3 kabupaten.
2. Lokakarya pengkajian kebutuhan untuk mendukung sistem informasi bencana kabupaten telah dilakukan di 3 kabupaten
3. Tim DDIS yang terdiri dari berbagai pihak telah dibentuk di daerah yang terkena dampak.

Gambar 3. 12: Pertemuan pada Sistem Informasi Bencana Kabupaten (DDIS) formulasi grand design di Kabupaten Kediri



Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten sebagai sistem informasi pendukung untuk penanggulangan bencana telah disosialisasikan. Kesepakatan dari Desa dan Kecamatan pemerintah telah diperoleh. Kebutuhan Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten sesuai dengan konten lokal telah diidentifikasi. Di sisi lain, harmonisasi database antar SKPD menjadi tantangan untuk memfungsikan software DDIS berjalan dengan baik. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah:

1. Pengembangan software Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten
2. Presentasi software Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten dan menjaring masukan.
3. Konsultasi publik mengenai Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten

2. Ketersediaan rencana kontinjensi dan penilaian risiko banjir lahar dingin

Lokakarya penyebaran informasi ancaman bencana lahar dingin telah dilakukan di 3 kabupaten, melibatkan desa-desa yang berisiko tinggi, BBWS, PVMBG, BPBD dan LSM lokal. Penyusunan rencana kontinjensi untuk banjir lahar dingin telah disepakati untuk dilakukan di Malang-Blitar-Kediri. Diseminasi telah dilakukan di tiga kabupaten, tim penyusun rencana kontinjensi terdiri dari pemerintah desa telah dibentuk, kesepakatan strategi, proses dan rencana kerja yang telah dibuat.

Kegiatan yang disebutkan di atas dilanjutkan dengan pelatihan penilaian risiko yang telah dilakukan di tiga kabupaten, peninjauan lapangan untuk menilai risiko telah dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, BPBD, Jangkar Kelud, ahli dari universitas, BBWS dan PVMBG. Tujuan pelatihan adalah untuk mengumpulkan data risiko dari 3 sungai berisiko tinggi di tiga kabupaten termasuk data sekunder penduduk, data ternak, data mata pencaharian, dan layanan dasar.

Gambar 3. 13: Pelatihan pengumpulan data untuk tim survei di Malang dan Blitar



Pelatihan pengumpulan data untuk tim survei di Malang



Pelatihan pengumpulan data untuk tim survei di Blitar

UNDP juga memberikan bantuan teknis untuk merumuskan rencana kontinjensi bagi sebagian besar daerah berisiko sepanjang DAS Kelud untuk penyusunan rencana kontinjensi. Memobilisasi para ahli dari Universitas, BBWS, BMKG dan PVMBG. Konsultan akan memberikan bantuan teknis untuk BPBD di 3 kabupaten yang terkena dampak untuk penyusunan rencana kontinjensi. Transfer pengetahuan harus dilakukan karena proses pembelajaran bersama dengan staf BPBD. Tindak lanjut dari kegiatan di atas adalah:

1. Pengumpulan Data dan penilaian risiko

2. Verifikasi Data dan Analisis Data
3. Penyusunan Laporan
4. Sosialisasi

3. Penyusunan Rencana kontingensi termasuk manajemen ternak dalam situasi darurat FAO telah mulai mengembangkan rencana kontingensi berbasis masyarakat pada ternak dengan membentuk tim pada tanggal 9 September 2015. Tim ini terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. tantangan untuk mengembangkan rencana ini karena BPBD Kediri dan BPBD Malang belum memperbarui rencana kontingensi pasca letusan lalu. Oleh karena itu, FAO dan UNDP telah mendorong BPBD untuk memperbaruinya. BPBD Kediri bersedia untuk menyusun penilaian risiko pada tahun 2016. Penilaian tersebut akan digunakan oleh FAO sebagai dasar untuk mengembangkan rencana kontingensi pada ternak.

Gambar 3. 14: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kontingensi



3.6. Pemanfaatan Dana IDF World Bank Window

Sesuai dengan Nota Kesepahaman tentang pembentukan IMDF-DR yang ditandatangani pada Desember 2009, ruang lingkup kegiatan Bank Dunia (juga dikenal sebagai Disaster Management Fund -DMF) meliputi:

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan, permukiman dan infrastruktur, dan
- Peningkatan kapasitas untuk pemulihan dan pengurangan risiko bencana

Dalam SOP IMDFF-DR telah ditetapkan bahwa pelaksana dari kegiatan pada *window* Bank Dunia adalah kementerian/lembaga dengan modalitas pelaksanaan sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran pemerintah. Dengan memperhatikan koridor-koridor yang telah ditetapkan, kegiatan awal dilakukan dengan dukungan dana dari Pemerintah Selandia Baru adalah difokuskan pada dukungan untuk upaya Pemerintah dalam melembagakan pengalaman dan praktek terbaik dalam rehabilitasi perumahan dan permukiman dan rekonstruksi, yang telah ada sejak Tsunami Aceh sampai dengan pemulihan pasca erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan permukiman berbasis masyarakat (yang dikenal sebagai REKOMPAK) telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pemulihan perumahan untuk pemulihan berbagai kejadian bencana beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, dukungan IDF melalui *window* Bank akan dilakukan pada kegiatan penguatan dan replikasi pengalaman untuk mendukung rehabilitasi perumahan dan permukiman di daerah bencana yang terjadi belakangan ini maupun daerah yang terkena dampak di Indonesia di masa mendatang.

Pada Rapat Tim Pengarah 13 Mei 2014, telah disepakati alokasi dana untuk beberapa kegiatan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Manado dan Sinabung. Dukungan *window* Bank Dunia akan difokuskan adopsi skema REKOMPAK ke skema pendanaan saat ini. Ada beberapa peristiwa penting yang mencerminkan perubahan dalam pelaksanaan (terutama dana) prosedur serta mandat dan kebijakan kelembagaan dari instansi pemerintah yang terkait dengan rehabilitasi perumahan dan permukiman. Perubahan ini meliputi:

- a. Kebijakan direktif Presiden pasca kunjungan ke Sinabung pada 29 Oktober 2014, di mana rekonstruksi perumahan dilakukan oleh TNI, menandakan pergeseran pendekatan berbasis masyarakat (termasuk REKOMPAK) yang sebelumnya telah diadopsi oleh BNPB;
- b. Arahan Kementerian Keuangan terkait menarik pemanfaatan dana On-Call telah dialokasikan untuk rekonstruksi perumahan di Manado, menandakan bahwa dalam periode penanganan darurat singkat (seperti dalam kasus banjir bandang), dana On-Call tidak dapat digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Perubahan besar pada skema rehabilitasi dan rekonstruksi dimana dana sebelumnya langsung dikelola oleh BNPB, tapi dieksekusi oleh pemerintah lokal. Dengan skema hibah daerah di mana dana diberikan kepada pemda melalui mekanisme APBD; dan
- d. Perubahan struktural internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai instansi yang berwenang dalam memberikan bimbingan teknis untuk rehabilitasi perumahan dan permukiman, di mana unit kerja sebelumnya (Satker) proyek REKOMPAK

direstrukturisasi, sehingga proyek di bahwa Unit kerja sebelumnya harus ditutup dan dibubarkan dan pembentukan unit proyek baru yang membutuhkan waktu lama.

Pelaksanaan Kemajuan Pendanaan Disetujui

Sejak Rapat Tim Pengarah lalu masih terdapat satu kegiatan tersisa untuk diselesaikan dan tiga kegiatan baru yang disetujui, yaitu:

- a. Kegiatan dalam tambahan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan berbasis masyarakat (REKOMPAK) yang bertujuan untuk memberikan perbaikan yang berkelanjutan untuk pelaksanaan rehabilitasi perumahan dan permukiman pasca erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2010 dengan total dana US\$ 1.500.000;
- b. Kegiatan baru yang terdiri dari: Dukungan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman untuk pasca bencana Sinabung, dan Manado dengan total dana US \$ 1.580.000; dukungan non-pemulihan (dukungan *knowledge management* dan monitoring dan evaluasi), dengan dana sebesar US \$ 69.750.

Pembiayaan tambahan dari proyek REKOMPAK

Alokasi hibah direncanakan untuk rekonstruksi perumahan untuk sekitar 100 unit rumah tidak dapat dimanfaatkan sampai REKOMPAK tutup pada akhir Juni 2015. Tidak tersedianya lahan untuk relokasi pemukiman di daerah yang aman di Provinsi Jawa Tengah menjadi kendala pelaksanaan program pembangunan pemukiman. Sementara itu di Yogyakarta, masyarakat yang masih tinggal di daerah berbahaya dan belum memutuskan (tidak bersedia) untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Mengingat jumlah penerima manfaat untuk pembangunan rumah yang belum dapat ditentukan, maka kegiatan ini dialihkan pada penyelesaian pembangunan infrastruktur masyarakat dan kegiatan pengembangan kapasitas, yang meliputi:

- a. Pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman.

Gambar 3. 15: Infrastruktur lingkungan permukiman



Drainase dan dinding penahan di Desa Jrasah



Jalan di Desa Tlogolele



Dinding penahan tebing di Desa Umbulharjo sistem air limbah komunal



- c. Dukungan pemulihan mata pencaharian, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH); pelatihan untuk industri rumah tangga, sistem pengelolaan sampah, pemanfaatan lahan yang terkena dampak untuk non-pemukiman; dan infrastruktur pencegahan bencana.

Gambar 3. 16: Showroom Rumah Produksi



Replikasi dan Pengarusutamaan REKOMPAK di Sinabung dan Manado; dan intervensi non-pemulihan

Beberapa perubahan yang telah diuraikan diatas berdampak pada persiapan pelaksanaan proyek dan persiapan kegiatan baru "Pengarusutamaan dan Replikasi REKOMPAK". Selain keterlambatan dalam pendanaan di Manado dan kurangnya kejelasan program pemulihan di Sinabung juga telah berdampak terhadap penundaan pelaksanaan kegiatan melalui window Bank Dunia. Setelah kejelasan dalam struktur internal Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (pada awal Mei 2015), yang penyusunan program Pengarusutamaan dan Replikasi REKOMPAK dimulai pada tanggal 19 Mei 2015. Namun, perubahan skema dana hibah masyarakat yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan BNPB juga telah menunda pemrosesan kegiatan ini. Pada awal September 2015 bahwa Peraturan Menteri Keuangan tertanggal 21 Agustus 2015 tentang Hibah untuk Pemerintah Daerah memungkinkan proyek yang akan disesuaikan dengan skema baru. saat ini kedua proses tersebut secara paralel dilaksanakan, yaitu: a) persiapan hibah baru yang didanai melalui anggaran (DIPA) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan b) pemrosesan Perjanjian Hibah baru. Kedua proses yang diharapkan akan selesai pada minggu pertama akhir Desember 2015.

Beberapa kegiatan intervensi non-pemulihan termasuk koordinasi dan persiapan awal diskusi penyusunan kebijakan telah dilakukan, yaitu:

- a. Penilaian awal tentang status dan kesiapan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman di Manado yang dilakukan bersamaan dengan kunjungan Duta Besa dan Development Counsellor dari Selandia Baru pada bulan Maret dan September 2015. Penilaian tersebut meliputi survei pendahuluan terhadap lokasi relokasi di daerah Pandu, dan konsultasi dengan SKPD terkait di Kota Manado a.l BAPPEDA, Badan Pertanahan (BPN), BPBD, dan Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Diskusi kebijakan terkait mekanisme hibah sebagai menjadi modalitas baru dalam memberikan hibah kepada masyarakat untuk rekonstruksi pasca bencana. Secara umum kemungkinan akan ada implikasi yang signifikan terhadap pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan berbasis masyarakat, karena hibah masyarakat kini diperlakukan hanya sebagai penyediaan pendanaan tunai atau pengadaan barang dan jasa, yang bertentangan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan keputusan serta melaksanakan pembangunan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdirinya fasilitas pendanaan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia melalui proses yang cukup panjang dan dinamis yang telah dimulai sejak tahun 2009. IDF bertujuan untuk memobilisasi dana dan mengkoordinasikan bantuan internasional dalam rangka mendukung dan melengkapi upaya Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Maka peran IDF adalah mengisi gap (gap filler) dan menjadi katalisator sehingga kualitas penanggulangan bencana dapat terus meningkat dengan memanfaatkan jejaring dan keahlian dan pengalaman mitra internasional.

Fasilitas pendanaan IDF ini ditujukan untuk lebih mengefektifkan pemanfaatan pendanaan luar negeri bagi penanggulangan bencana, dengan menerapkan pendekatan kepemilikan pemerintah dalam kesepakatan bersama serta fleksibilitas yang lebih besar dalam pemanfaatannya, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaannya.

Pada tahun 2015, kegiatan IDF difokuskan pada dukungan pemulihan pasca bencana di Sinabung, Kelud dan Manado serta penyelesaian pembangunan infrastruktur perumahan dan lingkungan permukiman pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Window United Nations melalui UNJP Sinabung dan UNJP Kelud

1. Proses pelaksanaan dukungan IDF di Sinabung mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Aktivitas Gunung Sinabung yang masih terus menyemburkan abu vulkanik dan status penanganan darurat yang berkepanjangan menjadi kendala utama kegiatan dukungan IDF tidak bisa segera dilaksanakan. Sementara kendala pelaksanaan UNJP Kelud terkendala dengan RENAKSI yang akan dirujuk sebagai pedoman pemulihan bagi semua pihak belum juga ditetapkan.
2. Proses relokasi dan pembangunan rumah bagi pengungsi di Sinabung serta ketersediaan lahan pertanian di Siosar mengakibatkan dukungan pemulihan *livelihoods* tidak bisa segera dilakukan. Hal yang sama juga terjadi di Manado, ketidakjelasan kebijakan relokasi dan pencairan dana pemerintah pusat menjadi kendala pelaksanaan dukungan IDF melalui window Bank Dunia tidak bisa segera dilakukan. Pemanfaatan dana pada window Bank Dunia sebagai komplemen pendanaan (co-financing) program rehabilitasi dan rekonstruksi

pemerintah membuat proses persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan sangat tergantung pada waktu dan ketersediaan anggaran pemerintah. Beberapa perubahan terjadi pada skema pendanaan pemerintah Skema rehabilitasi dan rekonstruksi, dan perubahan struktural internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi pelaksana hibah telah mengakibatkan penundaan pelaksanaan kegiatan. Melalui lebih koordinasi yang intensif, diharapkan penundaan dimasa mendatang dapat dihindari.

3. Kebijakan Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan dana On-Call, yang menetapkan bahwa pemanfaatan dana on-call hanya diperuntukkan untuk penanganan darurat dan tidak diperkenankan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Disamping itu, perubahan kebijakan baru terkait mekanisme pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan PMK 162/PMK.07/2015 yang membutuhkan Waktu untuk proses penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaannya.
4. Meskipun pelaksanaan UNJP Sinabung dan UNJP Kelud mengalami keterlambatan, beberapa kegiatan yang tidak terkait langsung dengan aktivitas pemulihan fisik sudah dapat dilaksanakan, seperti kegiatan-kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, kegiatan-kegiatan pelatihan penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat calon penerima manfaat telah dilakukan baik di Sinabung dan Kelud.
5. Selanjutnya, pelaksanaan dukungan IDF untuk Sinabung, Kelud dan Manado pada tahun 2016 masih difokuskan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang tertunda atau yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2015.
6. Pendekatan yang digunakan. Model pendekatan UNJP Sinabung dan Kelud, dan replikasi program REKOMPAK jauh lebih mudah dikembangkan karena skalanya kecil dan bersifat pilot project dibandingkan dengan RENAKSI yang skalanya besar. Dengan demikian, berbagai pembelajaran yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya dapat digunakan sebagai masukan bagi pelaksanaan Program RENAKSI Pemerintah melalui dialog intensif dalam kerangka koordinasi program RR di tingkat lokal.
7. Sebagai katalisator, pelaksanaan dukungan IDF perlu didorong dan dibutuhkan komitmen Pemerintah guna mendorong masyarakat agar lebih cepat membangun kehidupan perkonomian di wilayah hunian tetap. Kolaborasi dengan kelompok-kelompok untuk pengembangan *livelihood*, jaringan produser ke pemasaran dan pelaku dunia usaha serta pembentukan forum-forum diharapkan akan dapat meningkatkan peluang untuk menumbuhkan penghidupan masyarakat yang terdampak.

4.2. Rekomendasi

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam penguatan IDF dalam meningkatkan perannya sebagai katalisator dan gap filler dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya dalam mendukung upaya pemulihan di Sinabung, Kelud dan Manado adalah:

1. Membentuk forum koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memfasilitasi koordinasi antar pelaku pemulihan, termasuk berbagai tingkat lembaga pemerintah serta organisasi masyarakat sipil, dan LSM dengan menggunakan kapasitas lokal. Dengan adanya peluang kemitraan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan dan mempromosikan kapasitas sumber daya lokal dalam melakukan pemulihan di Sinabung, Kelud dan Manado.
2. Potensi tumpang tindih dan peran antara BPBD, TPN, Tentara Nasional, dan Satuan Tugas Nasional untuk Relokasi Siosar (SATGAS Percepatan). Penguatan Kemitraan dan pengembangan kapasitas lokal serta membangun komunikasi dan penetapan kewenangan para pemangku kepentingan sesuai dengan fungsi dan peran kelembagaan untuk memastikan sumber daya yang efektif.
3. Salah satu yang sangat mendesak adalah dukungan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan SOP, penguatan kebijakan, dukungan penyusunan juknis dan juklak terkait mekanisme baru pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Perluasan dukungan pendanaan dari IDF ke lokasi lainnya. Selama ini dukungan IDF lebih difokuskan kepada wilayah pascabencana yang dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia membutuhkan dukungan internasional. Namun, melihat banyaknya kawasan rawan bencana dan daerah pasca bencana yang membutuhkan dukungan, perlu dilakukan perluasan dukungan baik pada tahap pra-bencana maupun pada pascabencana.
5. Perluasan ruang lingkup IDF disesuaikan dengan perubahan ruang lingkup yang lebih luas dari kegiatan pasca bencana dan memperbaiki business process, pembagian peran dan peningkatan fungsi koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana dengan harapan dapat memberikan masukan terhadap model aid instrument yang efektif dimasa depan
6. Pembentukan Tim Koordinasi IDF dengan tujuan untuk mendukung tersusunnya langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tertimpa bencana dan juga untuk memperkuat kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan dalam menghadapi bencana.

7. Peningkatan peran IDF sebagai gap filler dan katalisator dalam merespon pemulihan bencana dan mendukung implementasi Renaksi di daerah pasca bencana. Pemulihan mata pencaharian dengan mengembangkan potensi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat sasaran dan pemerintah serta mengembangkan jaringan pemasaran terhadap produk-produk yang dihasilkan merupakan intervensi yang tepat. Masalah *sustainability* tetap menjadi isu untuk ditindaklanjuti.

Promosi IDF penting agar dikenal lebih luas baik oleh masyarakat dan stakeholder di Indonesia maupun Internasional untuk memberikan dukungan penanggulangan bencana di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan leaflet, laporan, pembelajaran, cerita-cerita sukses, pemutakhiran website dan pertemuan-pertemuan koordinasi donor/stakeholder.